

**ANALISIS PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH RENCANA KAWASAN 1 KOTA  
BANJARMASIN KUIN UTARA - ALALAK SELATAN - ALALAK TENGAH -  
ALALAK UTARA**

***Analysis of the Implementation of the Settlement of Slum Settlements in the Region One (1)  
Plan of Banjarmasin City, North Kuin - South Alalak - Central Alalak – North Alalak***

Dwi Kurniasih<sup>1)</sup>, Ira Mentayani, Lilis Hartati, Zainal Abidin

- <sup>1)</sup> Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan  
Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat  
e-mail: [dwikurnia85@yahoo.com](mailto:dwikurnia85@yahoo.com)

**Abstract**

The purpose of this research is to identify factors inhibiting the implementation of the arrangement of the slum area plan for Banjarmasin City. The method used in this study uses purposive sampling data collection techniques, namely secondary and primary (Questionnaire, interview, observation/observation) in the city of Banjarmasin. The method of data analysis with the help of SPSS 25 is to find out the Data Validation and Reliability Tests for the inhibiting factors in the arrangement of slums, the inhibiting index of the inhibiting factors in the structuring of slums, and the partial F test to find out the significant levels of the factors inhibiting the implementation of slums. The results of the research that have been carried out that obtained 20 implementation factors and 8 factors inhibiting the implementation of the arrangement of slums are low community income, lack of community involvement in decision making, documents that are not of good quality, non-functioning KPP (Development Maintenance Group), the quality of community self-help groups still low, the difficulty of changing people's behavior.

*Keywords: slum settlement structuring, Factors that inhibit slum structuring, slum settlement structuring strategies*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia telah memenuhi target MDG's (Millenium Development Gold's), tentang perumahan dan permukiman kumuh perkotaan. RPJMN (Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 tentang zero kumuh. Implementasi RPJMN 2015-2019 merupakan langkah awal dalam mengejar target *zero* kumuh yang telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2014 dengan menyusun *road map* penataan kumuh serta pemuktahiran data kumuh.

Kota Banjarmasin adalah Kota Seribu Sungai. Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 158 Tahun 2011 sedikitnya terdapat 102 jaringan sungai yang membelah Kota Banjarmasin dengan luas kawasan kumuh di bantaran sungai 42%. Pekembangannya yang tidak terkendali sehingga kawasan-kawasan tepian sungai yang sebenarnya dapat menjadi aset Kota Banjarmasin, sebaliknya menjadi wajah buruk bagi Kota karena banyaknya permukiman kumuh baik didaratan maupun di bantaran sungai Kota Banjarmasin. Luasan kumuh Kota Banjarmasin 549,70 Ha (5,58% dari luas wilayah Kota Banjarmasin). Luas kumuh yang berada di bantaran sungai sebesar 229,44 Ha sebesar

41,74% yang tersebar di 5 kecamatan, 52 kelurahan dan 7 Rencana Kawasan.

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk (Suparlan, 2008). Ciri-cirinya antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Permasalahan terbesar adalah persampahan di lingkungan masyarakat sudah tersedia bak sampah namun kesadaran masyarakat masih rendah, Limbah cair juga menjadi kendala yaitu ketersediaan lahan untuk penempatan bioseptick dan jaringan yang belum sampai ke Rencana Kawasan 1. Dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan program belum memiliki kualitas baik sehingga pelaksanaan penataan permukiman belum mampu merubah wajah kawasan, minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan hasil pembangunan masih rendah.

Masyarakat dilokasi penelitian memiliki pendidikan rendah dan pendapatan di bawah UMR Kota Banjarmasin sehingga untuk menyediakan hunian yang layak serta fisik dasar lingkungan yang memadai tidak memiliki anggaran pembiayaan. Penelitian ini akan Menganalisis faktor – faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh Rencana Kawasan 1 Kota Banjarmasin.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara purposive sampling yaitu sekunder dan primer (Kuesioner, wawancara, observasi/pengamatan) pada Kota Banjarmasin. Metode analisis data dilakukan untuk mengetahui Uji Validasi

Data dan Reabilitas terhadap faktor-faktor penghambat penataan pemukiman kumuh, indek penghambat faktor-faktor penghambat penataan pemukiman kumuh, dan uji F persial untuk mengetahui tingkat signifikan faktor-faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Identifikasi faktor - faktor Implementasi Penataan Permukiman Kumuh*

1. Identifikasi Permasalahan Kekumuhan
  - a. Permasalahan Kekumuhan berdasarkan Dokumen RPLP  
Permasalahan kekumuhan dari dokumen RPLP (Rencana Pentaan Lingkungan Permukiman). Analisa yang didapat dari RT lokasi penelitian dengan luas kumuh 4.08 Ha diperoleh peringkian aspek kekumuhan sebagai berikut:
    - Kondisi pengelolaan persampahan 90.18%
    - Pengelolaan air limbah 63,70 %
    - Kondisi bangunan gedung 29,56%
    - Proteksi kebakaran 28.47%
    - Kondisi penyediaan air minum 27,74%
    - Kondisi drainase lingkungan 25,30%
    - Kondidi jalan lingkungan 20,55%
 Permasalahan kekumuhan dokumen RPLP (Rencana Pentaan Lingkungan Permukiman) bahwa rata-rata masing-masing bangunan gedung sebesar 29.56%, kondisi jalan lingkungan sebesar 20.55%, kondisi penyediaan air minum sebesar 27,74, kondisi drainase lingkungan sebesar 25.30, penyediaan air limbah 63.30%, kondisi pengelolaan sampah persampahan sebesar 90,18 dan kondisi proteksi kebakaran sebesar 28,47%.

b. Permasalahan Kekumuhan berdasarkan Pendapat Masyarakat Permasalahan kekumuhan dengan ranking aspek kekumuhan berdasarkan hasil kuesioner sebagai berikut:

- Kondisi pengelolaan persampahan dengan 89.19%
- Bangunan gedung dengan 43.24%
- Kondisi Penyediaan Air Limbah dengan 25.68%
- Kondisi jalan lingkungan dengan 8.11%
- Kondisi drainase lingkungan dengan 1.35%
- Proteksi kebakaran dengan 1.35%
- Kondisi penyediaan air minum dengan 0%

c. Kesesuaian Pembangunan Penataan Permukiman Kumuh

Kesesuaian pembangunan dibandingkan dengan permasalahan kekumuhan berdasarkan hasil kuesioner yaitu kondisi kumuh awal dan kondisi kumuh akhir, bahwa rata-rata masing-masing bangunan gedung sebesar 29,56% dan 26,76%, kondisi jalan lingkungan sebesar 20,55% dan 00.00%, kondisi penyediaan air minum sebesar 27,74% dan 27,74%, kondisi drainase lingkungan sebesar

25,30% dan 20,62%, penyediaan air limbah 63,70% dan 20.03%, kondisi pengelolaan sampah persampahan sebesar 91,18% dan 00,00% dan kondisi proteksi kebakaran sebesar 28,47% dan 00,00%.

Hasil dari analisa pengurangan persentase kekumuhan diperoleh ranking aspek kekumuhan yang telah diselesaikan sebagai berikut:

- Kondisi persampahan berkurang 100%
- Proyeksi kebakaran berkurang 100%
- Kondisi jalan lingkungan berkurang 100%
- Kondisi bangunan gedung berkurang 90.53%
- Kondisi drainase berkurang 81.52%
- Penyediaan air limbah berkurang 31.45%
- Kondisi penyediaan air minum berkurang 0%

d. Permasalahan dilapangan terkait aspek kekumuhan

Karakteristik pemukiman kumuh kawasan 1 kota Banjarmasin, dihuni oleh masyarakat dengan suku yang berbeda-beda. Dari hasil surve dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis

Gambar 1. Menunjukkan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis karena pada kawasan tersebut bahwa 1. Bak sampah sudah tersedia dipermukiman

dengan system 3R/pilah namun masyarakat belum memilahnya. 2. Pengalih fungsian penggunaannya bak sampah. 3. Bak sampah tinggal kerangkanya saja dan bak sampah

sudah tidak ada. 4. Masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa sampah rumah tangga adalah tanggung jawab pemerintah.

- Bangunan Gedung  
Kondisi rumah tidak layak huni dikarenakan tingkat ekonomi

masyarakat rendah sehingga tidak mampu membangun rumah layak, program yang masuk adalah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).



Gambar 2. Ketidak Teraturan Bangunan

Gambar 2 menunjukkan bahwa ketidak teraturan bangunan gedung akan mempengaruhi tingkat kekumuhan suatu kawasan yang berdasarkan perekonomian masyarakat setempat. Oktaviansyah (2012), menyatakan bahwa perekonomian masyarakat yang rendah menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh.

- Pengelolaan Limbah  
Permasalahan dilapangan terkait pengelolaan limbah adalah septicktank tidak standar/cubluk. Penanganan air limbah dengan sistem bioseptik terkendala hibah lahan oleh masyarakat, karena lokasi yang sempit, adapun Gambar 3 dibawah ini



Gambar 3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Gambar 3. Menunjukkan bahwa masyarakat masih menggunakan sistem sanitasi diatas air karena masyarakat belum memiliki sanitasi yang memadai atau WC pribadi. Sehingga akan mencemari

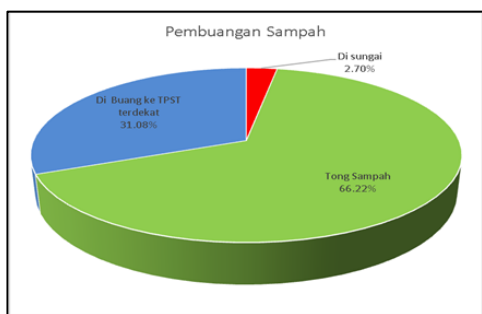
air dan lingkungan (Oktaviansyah, 2012).



2. Identifikasi Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh

Kebijakan kota merupakan acuan yang harus di perhatikan dalam penataan permukiman kumuh terutama aspek kekumuhan yang paling bermasalah dalam lokasi penelitian, adapun hasil dari identifikasi permasalahan kekumuhan antara lain aspek sebagai berikut:

a. Sektoral Pengelolaan Persampahan



Gambar 4. Pembuangan Sampah di kawasan penelitian

b. Sektor Pengelolaan Air Limbah.

Lokasi penelitian seharusnya dilayani IPAL HKSAN dengan wilayah pelayanan antara lain: Kelurahan Alalak Tengah, Alalak Utara, Alalak Selatan, dan Pangeran. Lokasi IPAL HKSAN di Jalan HKSAN No. 09 Rt. 08

dengan kapasitas 5.000 m<sup>3</sup>/hari dengan jumlah sambungan rumah 1.708 sambungan rumah, namun lokasi kumuh belum terlayani sehingga permasalahan sanitasi di lokasi penelitian sangat tinggi

c. Peraturan Daerah Penataan Permukiman Kumuh Kota

Mewujudkan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

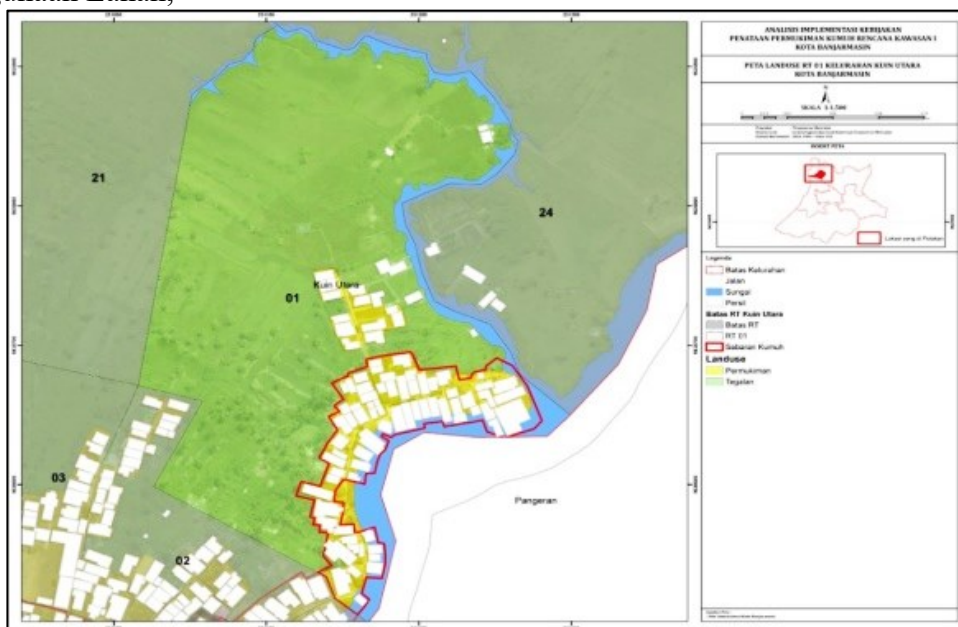
a) Peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat.

b) Kearifan lokal merupakan aturan perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

c) Peningkatan kualitas permukiman kumuh perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana meliputi:

- 1) Kehidupan masyarakat di bantaran sungai harus dipertahankan
- 2) Kawasan bantaran sungai yang mencerminkan wajah kota.

d. Penggunaan Lahan,



Gambar 5. Peta Penggunaan lahan RT 001 Kuin Utara

- e. Pedoman Teknis Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)  
Pelaksanaan infrastruktur harus sesuai dengan dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) lokasi prioritas yang telah di sepakati oleh masyarakat. Prasarana yang diperbolehkan dibangun di Program KOTAKU di kawasan prioritas yang sudah disepakati oleh masyarakat sesuai arahan Pedoman Operasional pelaksanaan seperti pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jenis Sarana Prasarana Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

No	Indikator/Aspek	Jenis Sarana Prasarana
1	Kondisi bangunan hunian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab rumah tidak layak huni (RTLH *) :</li> <li>• Rumah tunggal</li> <li>• Rumah deret</li> <li>• Rumah kopel</li> </ul>
2	Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan aspal/hotmix (min.lebar perkerasan 1,5m)</li> <li>• Jalan paving blok/beton (min.lebar perkerasan 1,5m)</li> <li>• Jalan sirtu/makadam/Telfordmin.lebar perkerasan 1,5m)</li> <li>• Jembatan (min.lebar perkerasan 1,5m)</li> <li>• Pedestrian</li> <li>• Bangunan pelengkap jalan seperti gorong gorong, Penahan Longsor, saluran samping jalan, dll</li> </ul>
3	Saluran air hujan (drainase lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saluran terbuka</li> <li>• Saluran tertutup</li> <li>• Sumur resapan/biopori</li> <li>• Pompa air/pintu air/pengendali banjir</li> <li>• Normalisasi saluran</li> <li>• Bangunan pelengkap:</li> <li>• Pertemuan saluran</li> <li>• Bangunan terjunan</li> <li>• Jembatan/Talang</li> </ul>
4	Pembuangan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jamban komunal</li> <li>• MCK komunal</li> <li>• Septictank komunal</li> <li>• Jaringan perpipaan air limbah r.tangga</li> <li>• System pengolahan air limbah setempat/terpusat</li> </ul>
5	Penyediaan air minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumur gali terlindung/pompa/bor skala komunal</li> <li>• Hidran/kran umum skala komunal</li> <li>• Penampung air hujan skala komunal</li> <li>• Jaringan air bersih perpipaan</li> <li>• Penangkap mata air terlindung</li> <li>• Instalasi pengolahan air sederhana skala komunal</li> <li>• Penyediaan sambungan rumah (SR) dari PDAM atau swasta *)</li> </ul>
6	Pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan</li> <li>• Tempat penampungan sementara (TPS)</li> <li>• Tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R)</li> </ul>

No	Indikator/Aspek	Jenis Sarana Prasarana
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerobak/motor sampah</li> </ul>
7	Pengamanan bahaya kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pasokan air (Bak/Kolam penampungan air, sumur Dalam/Hidran)</li> <li>• Motor pemadam kebakaran</li> <li>• Alat pemadam api ringan (APAR) *)</li> </ul>
8	Ruang terbuka publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau (RTH)**)</li> <li>• Ruang terbuka non hijau (RTNH) seperti prasarana olahraga, sarana bermain, dll**)</li> <li>• Taman/tempat main, Luas 250 m2-9000 m2**)</li> </ul>

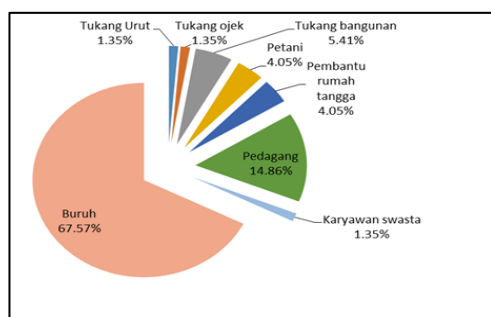
Keterangan: \* = didanai dari sumber dana kemitraan (non BDI NSUP)

\*\* = didanai dari BDI maksimum 10 % dari total nilai BDI kegiatan KSM yang tertuang dalam SPPDL.

Aturan pemanfaatan Program Kotaku adalah sebagai berikut :

- 1) Aturan \* didanai dari sumber dana kemitraan (non BDI NSUP)
- 2) Aturan \*\* didanai dari BDI maksimum 10 % dari total nilai BDI kegiatan KSM yang tertuang dalam SPPDL.
- 3) Jenis sarana prasarana yang tidak tercantum dalam tabel jenis sarana prasarana didanai dari sumber pendanaan kemitraan (Non KOTAKU), contoh: pengadaan tong sampah.

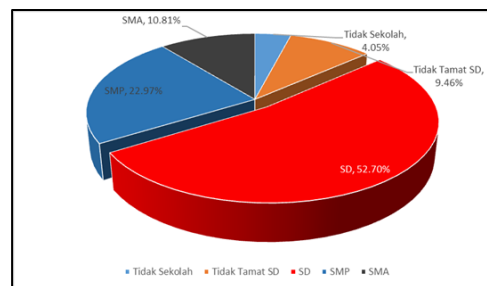
3. Identifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat Bidang sosial ekonomi peneliti menggunakan variabel penelitaian jenis mata pencaharian dan tingkat pendidikan.
  - a. Identifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat



Gambar 6. Diagram jenis mata pencaharian

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa pekerjaan paling banyak yaitu buruh 67.57% dan

- b. Tingkat Pendidikan  
Tingkat pendidikan mempengaruhi pola berfikir terhadap kehidupan yang layak dan rasa nyaman hidup di lingkungan kumuh



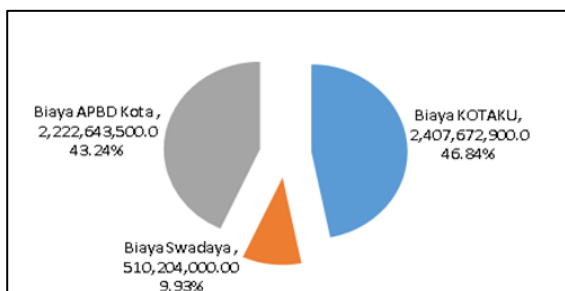
Gambar 7. Diagram tingkat pendidikan

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa masyarakat sekitar sebagian besar berpendidikan SD 52.70 % tidak tamat SD 9.46 %, tidak sekolah dengan 4,05 %.

4. Tingkat Kepuasan dan kebermanfaatan Masyarakat merasa puas dan bermanfaat terhadap hasil pembangunan sebanyak 100% karena pelaksana dalam pembangunan adalah masyarakat sendiri dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat.

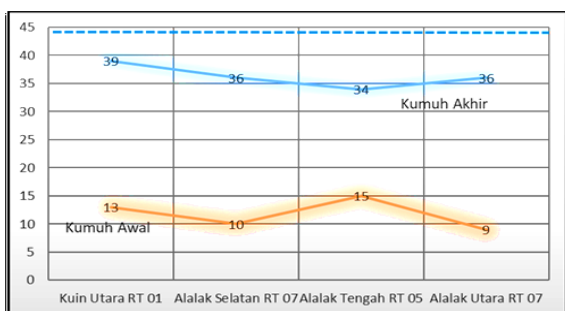
5. Identifikasi Pendanaan

Identifikasi pendanaan akan mengetahui apakah dengan pendanaan yang masuk akan mengurangi kekumuhan yang ada.



Gambar 8. Pendanaan penataan permukiman kumuh lokasi penelitian

6. Perhitungan pengurangan kumuh



Gambar 9. Grafik tingkat kekumuhan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pengurangan tingkat kekumuhan khususnya pada lokasi penelitian meningkat secara signifikan dari kisaran angka 10-15 menjadi 30-40.

Analisis Faktor Faktor Penghambat Penataan Permukiman Kumuh

1. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Data kuesioner selanjutnya dilakukan uji *validitas* dan *realibilitas* untuk mengetahui kevalidan serta kehandalan suatu variabel pengukur. Uji *validitas* dan uji *realibilitas* diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Jika ditemukan variabel yang tidak valid maka akan dilakukan drop atau dihilangkan untuk di analisa selanjutnya. Adapun hasil rekapitulasi uji validasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan uji *validitas* diketahui bahwa dari 20 variabel ada yang tidak valid  $X < 0.3$  yaitu setiap program mempunyai aturan sendiri dengan nilai  $X = 0.18$  dan memudarnya tingkat gotong royong dengan  $X = 0.24$  sehingga 2 variabel ini akan di drop dari perhitungan.

Tabel 2. Rekapitulasi Uji Validitas Faktor-Faktor yang Penghambat penataan permukiman kumuh

No	Faktor-faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh	Uji Validasi	Keterangan Kevalidan (Valid $X > 0.3$ )
1	Ketidaksiesuaian lokasi deleniasi kumuh dengan rencana Pola Ruang RTRW Kota Banjarmasin	0.81	Valid
2	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan	0.52	Valid
3	Perda Kumuh yang belum di syahkan	0.31	Valid
4	Dokumen perencanaan kelurahan RPLP ( Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang tidak berkualitas	0.54	Valid
5	Hibah lahan yang sangat sulit karena keterbatasan lahan	0.52	Valid
6	Setiap program mempunyai aturan tersendiri	0.18	Tidak Valid
7	Minimnya dana swadaya masyarakat	0.58	Valid
8	Minimnya pendanaan APBD Kota	0.81	Valid
9	Semakin menurunnya pendanaan APBN/ PHLN	0.59	Valid
10	Terkendalanya luas kumuh kewenangan propinsi (10 - 15 Ha) untuk dana APBD Provinsi	0.47	Valid



No	Faktor-faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh	Uji Validasi	Keterangan Kevalidan (Valid $X > 0.3$ )
11	Minimnya tukang yang memiliki sertifikasi keahlian	0.53	Valid
12	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga	0.44	Valid
13	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	0.65	Valid
14	Rendahnya pendapatan masyarakat	0.52	Valid
15	Memudarnya tingkat gotong royong	0.24	Tidak Valid
16	Sulitnya perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan	0.67	Valid
17	Kurangnya Keterlibatan anggota Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam merumuskan statregi penataan permukiman kumuh	0.65	Valid
18	keterlibatan dan ke aktifan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) di tingkat kelurahan masih minim	0.89	Valid
19	Kualitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam memanageren pelaksanaan fisik	0.52	Valid
20	KPP (Kelompok Pemelihara pembangunan) masyarakat masih belum berfungsi maksimal	1	Valid

Hasil Uji *realible* penelitian yang digunakan untuk mengukur faktor yang penghambat penataan permukiman kumuh adalah *realible* atau handal karena  $0.974 > 0.6$

2. Indek kepentingan peringkat  
Hasil dari Indek faktor-faktor penghambat penataan permukiman kumuh dan uji validitas dan reabilitas dilakukan peringkat dengan dasar nilai mean tertinggi yang menyebabkan faktor penghambat kekumuhan tertinggi dengan hasil dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. Uji Realibilitas Faktor-Faktor

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.974	20

Sumber Data: Hasil Uji *Realibilitas* SPSS

Tabel 4. Peringkat Faktor - Faktor Penghambat Penataan Permukiman Kumuh

No	Variabel Faktor faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh	Mean	Rangking
1	Rendahnya pendapatan masyarakat	4.55	1
2	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan	4.45	2
3	Dokumen Perencanaan kelurahan RPLP ( Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang tidak berkualitas	4.36	3
4	KPP (Kelompok Pemelihara pembangunan) Masyarakat masih belum berfungsi maksimal	4.27	4
5	Kualitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam memanageren pelaksanaan fisik	4.18	5
6	Sulitnya perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan	4.00	6
7	Minimnya pendanaan APBD Kota dalam menangani kumuh	3.82	7
8	Semakin menurunnya pendanaan APBN/ PHLN	3.73	8

Sumber Data: Hasil Analisa peringkat

3. Pembobotan dan Mean Terkoreksi Berdasarkan Tingkat Kepentingan Validnya peringkat item 1 sampai dengan 8 tersebut kita kalikan angka koreksi/bobot. Untuk memperoleh pembobotan terkoreksi dengan cara  $100\% / 8$  Variabel Hasil Penelitian terhadap faktor- faktor penghambat penataan permukiman kumuh dapat dilihat pada Tabel 4.28. dibawah ini

Tabel 5. Hasil Penelitian terhadap Faktor Penyebab Penghambat Penataan Permukiman

No	Variabel Faktor faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh	Mean (Tingkat Kepentingan) A	Pembobotan Terkoreksi b	Mean Terkoreksi (a*b)/100
1	Rendahnya pendapatan masyarakat	4.45	22.24	0.99
2	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan	4.36	19.46	0.85
3	Dokumen Perencanaan kelurahan RPLP ( Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang tidak berkualitas	3.82	16.68	0.64
4	KPP (Kelompok Pemelihara pembangunan) Masyarakat masih belum berfungsi maksimal	3.73	13.90	0.52
5	Kualitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam memanageren pelaksanaan fisik	4.55	11.12	0.51
6	Sulitnya perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan	4.00	8.34	0.33
7	Minimnya pendanaan APBD Kota dalam menangani kumuh	4.18	5.56	0.23
8	Semakin menurunnya pendanaan APBN/ PHLN	4.27	2.78	0.12

Sumber Data: Analisa Regresi Tahun 2019

4. Signifikasi Faktor - Faktor Penghambat Implementasi Penataan Permukiman Kumuh  
 Faktor-faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh dianalisa dengan uji F *chi square* digunakan untuk mengetahui fakttor faktor kekumuhan dengan nilai signifikan, Faktor- faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh sangat berpengaruh terhadap penataan permukiman kumuh minimal 95% dengan nilai signifikan = 0.05  
 Berdasarkan Uji F SPSS diketahui faktor penghambat implementasi penataan permukiman kumuh dengan nilai signifikan diterima variabel dependeny
1. Nilai significant < 0.05 dan dari uji f diketahui  $0.01 < 0.05$  yang berarti variabel faktor faktor penghambat penataan permukiman kumuh
  2. F hitung > dari F tabel . Ftabel=F( k.n-k)= F(8.11-8)= 8.85  
 Hasil F hitung > F tabel= 26.688 > 8.85 sehingga variabel faktor faktor penghambat sangat berpengaruh dalam penataan permukiman kumuh, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Uji F Terhadap Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Penataan Permukiman Kumuh

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	778.409	7	111.201	26.688	0.01 <sup>b</sup>
	Residual	12.500	3	4.167		
	Total	790.909	10			

Sumber : Uji F Tahun 2019

Dependent Variable: faktor yang menghambat penataan kawasan permukiman

Predictors: (Constant). Rendahnya pendapatan masyarakat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dokumen Perencanaan kelurahan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang tidak berkualitas. KPP (Kelompok Pemelihara pembangunan) Masyarakat masih belum berfungsi maksimal. Kualitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam memanagermen pelaksanaan fisik. Sulitnya perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan. Minimnya pendanaan APBD Kota dalam menangani kumuh. Semakin menurunnya pendanaan APBN/ PHLN

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 6 faktor yang dapat menghambat implementasi penataan permukiman kumuh yaitu rendahnya pendapatan masyarakat, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dokumen yang tidak berkualitas baik, KPP (Kelompok Pemelihara pembangunan) yang tidak berfungsi, kualitas kelompok swadaya masyarakat masih rendah, sulitnya merubah perilaku masyarakat. Hasil uji stasitik menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penataan pemukiman kumuh.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya dan shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua

orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan doa serta besarnya kepada Ibu Ira Mentayani selaku Ketua Komisi, Ibu Lilis Hartati selaku anggota 1, Ir Zainal Abidin selaku anggota 2 komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, E. (1992). *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Suparlan, P., Chryshnanda, D. L., & Syafri, Y. (2008). *Dari masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultural*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Oktaviansyah, E. (2012). Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 14(2), 141-150.